

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, Van, L.J. (1999), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta;
- Anderson, James, E. (1979), *Public Policy Formation*, New York, Halt, Rinehart and Winston ;
- Bauer, Raymond, A. (1968), *The Study of Policy Formation*, New York, Halt, Rinehart and Winston ;
- Bromley, Daniel W, (1989), *Economic Interest and Institution*, New York, Fuse Published ;
- Cohen, John M & Uphoff, Norman T. (1977), *Rural Development Participation : Concepts and Measures for Project Design Implementation an Evaluation*, Cornell University ;
- Dye Thomas, R. (1976), *Policy Analysis*, Alabama, The University of Alabama Press ;
- Engkoswara, (1987), *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta;
- , (1999), *Menuju Indonesia Modern 2020*, Bandung, Yayasan Amal Keluarga;
- Hadari Nawawi, (1984), *Administrasi Pendidikan*, Jakarta, Gunung Agung ;
- Huntington, Samuel P & John, (1994), *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta ;
- Imron, Ali (1995), *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Penerbit Bumi Akasara, Jakarta ;
- Jones, Charles O, (1996), *An Introduction to The Study of Public Policy*, Terjemahan R. Ismanto : PT Raja Grafindo
- Kartasapoetra, R.G. (1993), *Sistematika Hukum Tata Negara*, Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta ;
- Lili, (2002), *Pengaruh kebijakan Pembinaan Pemerintah terhadap Kemandirian SLTP Swasta*, Tidak dipublikasikan.
- Meleong, L.J. (1990), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit, Rosdakarya, Bandung ;
- Manan Bagir (1992), *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit, IND-HILL.CO, Jakarta ;

- Moekijat, (1995), *Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung ;
- N. Dunn William, (1998), *Analisis Kebijakan Publik*, Penerbit Gadjahmada University Press, Yogyakarta ;
- Nasution, S. (1992), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Penerbit Tarsito, Bandung;
- Nakamura, Robert, T. Smallwood, F, (1983), *The Politics of Policy Implementation*, Sint Marrin, New York ;
- Pal, Leslie A, (1992), *Public Policy Analysis : An Introduction*, Canada : Nelson ;
- Poerwadarminta, (1988), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung ;
- Purwanto, Ngalm, (1993), *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya;
- Rido, Ali, (1977), *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Penerbit Alumni, Bandung ;
- Ripley, Rendall, B. (1994), *Policy Analycis in Politycal Science*, Nelson Hail, Chicago
- Sanusi Ahmad, Supandi, (1988), *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, P2LPK, Jakarta ;
- Soekanto Soeryono, (1969), *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit Yayasan Universitas Indonesia, Jakarta ;
- Suryadi Ace, Tilaar H.A.R. (1993), *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung ;
- Surono, (2000), *Hubungan Pemberdayaan dan Peranserta Masyarakat dengan Pembiayaan Pendidikan Seklah*, Tidak dipublikasikan.
- Sumaatmadja Nursid, (1996), *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup*, Penerbit Alfabeta, Bandung ;
- Sumardjan Selo, Soemardi Soelaeman, (1964), *Setangkai Bunga Sosiologi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta ;
- Van Mater, Doral, and Carl , E. Van Horn, (1974), *The Policy Implementation Process Administration & Society*. Vol 6. No. 4 ;

Wahab, Solichin Abdul, (1997), *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta ;

Wibawa, Samodja, (1993), *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta;

Wasliman, Iim, (1998), *Pemberdayaan Tim Koordinasi Wajar Dikdas dalam Meningkatkan Peranserta Masyarakat pada Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kotamadya Bandung*. Tidak dipublikasikan:

Yan Pramandya Puspa, (1977), *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang ;

DOKUMENTASI HUKUM

Undang-undang Dasar 1945, beserta *Amandemen I dan II Undang-undang Dasar 1945*, Tahun 1999, Penerbit Penabur Ilmu, Jakarta :

Ketetapan MPR. RI. Nomor III Tahun 2000, Tentang *Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan*, Biro Hukum dan Humas, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta ;

Undang-undang RI. Nomor 2 Tahun 1989, Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Biro Hukum dan Humas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta ;

Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 1999, Tentang *Pemerintahan Daerah*, Dirjen Dikdasmen Depdikbud, Jakarta ;

Undang-undang RI. Nomor 16 Tahun 2001, Tentang *Yayasan*, Penerbit Cipta Jaya, Jakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, *Tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Penerbit Citra Umbara, Bandung ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, *Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*, Penerbit Citra Umbara, Bandung ;

Keputusan Presiden RI. Nomor 30 Tahun 1989, tentang *Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional*, Biro Hukum dan Humas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta ;

Keputusan Bersama Mendikbud, Mendagri, dan Menkeu RI, Nomor 0257/K/1974, Nomor 22 dan Nomor Kep 1606/MK/I/II/1974, tahun 1974, Tentang *Peraturan Sumbangan Pendidikan*, Biro Hukum dan Humas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta :

Keputusan Mendikbud RI, Nomor 0293/U/1993, Tahun 1993 Tentang **Pembentukan BP3**, Biro Hukum dan Humas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta;

Instruksi Bersama Mendikbud dan Mendagri RI, Nomor 17/O/1974, Tahun 1974, Tentang **Pembentukan BP 3**, Biro Hukum dan Humas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta ;

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95, Tentang **Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat**, Kanwil Depdikbud Prop. Jabar

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPDM Pasundan Tahun 1999

SUMBER LAIN

Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, **Hubungan Pusat Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah**. Makalah pada Seminar Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Hatta Internasional Legal Counsellors, Jakarta, 20 Juli 1999 hal 8.

Hafid Abbas, **Community – Based Education in Indonesia. Why, What and How**. Makalah Bappenas – Word Bank, Jakarta, 2 Pebruari 2000

DR. H. Mohammad Fakry Gaffar, M.Ed, **Disentralisasi dan Implikasinya Terhadap Perencanaan Pendidikan**, Makalah disajikan dalam Pertemuan Nasional Adpen di Bukit Tinggi, 16-18 September 1991

Sudarsono Hardjosoekarto, **Perubahan Kelembagaan : Teori Implikasi dan Kebijakan Publik**. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Nomor 1/Volume I, Maret, Jakarta : 1993

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Laporan Buku. Makalah. Skripsi. Tesis. Disertasi, Departemen Pendidikan Nasional, Universitas Pendidikan Indonesia.

Harian Umum Pikiran Rakyat tanggal 14 Mei 2001

Harian Media Indonesia tanggal 30 Oktober 2001

